

# **PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA MODAL, DAU, DAN DAK TERHADAP PENCAPAIANSDGs DI BIDANG EKONOMI (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2018-2019)**

Nadia Shofiatun Jannah<sup>1</sup>, Andy Dwi Bayu Bawono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57169  
[nadiamond28@gmail.com](mailto:nadiamond28@gmail.com), [andy.bawono@ums.ac.id](mailto:andy.bawono@ums.ac.id)

## **ABSTRAK**

Pencapaian SDGs 2030 menjadi target bagi anggota PBB tak terkecuali Indonesia, khususnya bidang ekonomi poin pertama yaitu mengentaskan kemiskinan global dengan segala bentuknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, DAU, dan DAK terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals*(SDGs)di Bidang Ekonomi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018-2019 yang berjumlah 514 daerah. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dan kriteria yang dibutuhkan yaitu kabupaten/kota yang menyediakan laporan realisasi APBD tahunan secara lengkap dan informasi statistik pengeluaran per kapita tahun 2018-2019. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, kabupaten/kota yang dapat dijadikan sampel penelitian berjumlah 507 daerah dan menghasilkan 1011 obsevasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan model terpilih *fixed effect model* yang diolah menggunakan software *Eviews* versi 9.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals*(SDGs)di Bidang Ekonomi. 2) Belanja Modal, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals*(SDGs)di Bidang Ekonomi.

Kata Kunci: Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, DAU, DAK, *Sustainable Development Goals* (SDGs).

## **ABSTRACT**

*The achievement of SDGs in 2030 is a target for UN members, including Indonesia, especially in the economic sector, the first point is to alleviate global poverty in all its forms. This study aims to analyse the Effects of Social Assistance Expenditure, Capital Expenditure, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in the economic sector. The population used in this study is all districts/cities in Indonesia in 2018-2019. The population of this research was 514 district/cities in Indonesia from 2018-2019. The sampling method uses purposive sampling method, and the criteria of this study are the districts/cities that provide complete and timely financial based on the APBD's realization report in the fiscal year 2018-2019 and statistical information of per Capita Expense. Based on the above criterias, sample from 507 district/cities were obtained for data analysis and maked 1011 observations. The analysis used in this study is panel data regression analysis with models chosen fixed effect model which*

was processed using the Eviews version 9.0 software program. The result shows that: 1) the Social Assistance Expenditure has not significantly influence in the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in the economic sector. 2) Capital Expenditure, General Allocation Funds, and Special Allocation have a positive and significant effect in achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in the economic sector.

*Keywords: Social Assistance Expenditure, Capital Expenditures, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Sustainable Development Goals (SDGs).*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara kurang berkembang. Menurut Benny H. Hoed (1998), pembangunan dapat diartikan dengan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan, dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan. Kesejahteraan diukur dengan tingkat ekonomi dan distribusi pendapatannya (Yasa dan Arka, 2015). Kesejahterannya juga dapat dilihat dari pendapatan yang meningkat sehingga konsumsi juga meningkat (Suartha, 2012). Tujuan utama dari adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila berlangsung secara berkesinambungan dalam segala sektor, khususnya sektor perekonomian yang menjadi salah satu isu global dan dikaji oleh banyak pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan negara dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu membentuk organisasi kenegaraan atau lebih dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar Sidang Umum ke 70 dan menjadi awal sejarah baru dalam pembangunan global. Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang menghadiri sidang dengan diwakili wakil presiden Yusuf Kalla bersamaan dengan 192 kepala negara dan pemerintahan dunia untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tercantum dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* yang mulai berlaku pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs.

Istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) diusulkan pertama kali oleh Pemerintah Kanada, Peru, Guatemala, dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012 untuk menjadi agenda pembangunan global. Hasil dari Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB 2012 (Rio20+) yang telah menegaskan bahwa semua komunitas internasional harus melakukan pembangunan global dengan cara semua negara ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat menyelesaikan agenda pembangunan dengan tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, termasuk saat perubahan iklim. SDGs juga diharapkan dalam agenda transformasi yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang (Puspitasari, 2019).

Dalam pembentukan agenda pembangunan berkelanjutan, banyak pertemuan yang dilakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi dari semua kalangan. Pada setiap pertemuan hanya difokuskan pada perumusan SDGs. Perumusan tersebut berasal

dari tiga sumber yaitu, *High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP)*, *Open Working Group (OWG)*, dan *Sustainable Development Solutions Network (SDSN)* (Badan Pusat Statistik, 2014).

SDGs merupakan kelanjutan program *Millennium Development Goals (MDGs)* yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tercantum dalam tujuan dan sasaran.

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 pada 4 Juli 2017. Perpres ini berisi tentang pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disampaikan presiden dalam kesempatan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di *Hamburg Messe Und Congress*, Jerman pada 7 Juli 2017. Di Indonesia, SDGs lebih dikenal dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemenuhan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan SDGs atau TPB dengan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Program SDGs menetapkan 17 tujuan dan 169 target yang meliputi masalah pembangunan berkelanjutan serta beberapa indikator yang memiliki mekanisme sendiri untuk disempurnakan. SDGs menekankan prinsip mendasar yaitu, *People* (Manusia), *Planet* (Bumi), *Prosperity* (Kemakmuran), *Peace* (Perdamaian) dan *Partnership* (Kerjasama) atau lebih dikenal dengan prinsip 5P. Adapun tujuan SDGs di bidang ekonomi yaitu mengentaskan kemiskinan global dengan segala bentuknya merupakan tujuan pertama dari SDGs, karena hal ini merupakan hal yang mendasar dan utama dalam melaksanakan pembangunan. Mengakhiri kelaparan melalui ketahanan pangan, peningkatan gizi dan peningkatan pertanian yang berkelanjutan, merupakan tujuan kedua dari SDGs. Membangun ketenagakerjaan & pekerjaan yang layak untuk semua dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah tujuan ketiga bidang ekonomi dan merupakan tujuan kedelapan dari SDGs. Membangun industri dan infrastruktur yang berkelanjutan dan mempromosikan inovasi adalah tujuan keempat bidang ekonomi dan merupakan tujuan kesembilan dari SDGs. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan adalah tujuan kelima atau terakhir bidang ekonomi dan merupakan tujuan duabelas dari SDGs. Berbagai tujuan dan target serta prinsip tersebut akan menjadi tuntutan bagi kebijakan dan pendanaan pembangunan hingga 2030.

Tantangan pelaksanaan SDGs dalam era desentralisasi seperti sekarang tidak hanya ada di tingkat global dan nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di satu sisi, pemda akan menghadapi tantangan rumit, sementara disisi lain pemda memiliki sumber daya dan kapasitas yang terbatas untuk mengatasinya. Pencapaian SDGs di daerah, peran dan rasa kepemilikan pemda harus ditingkatkan karena mereka merupakan ujung tombak kesuksesan pelaksanaan agenda pembangunan global. Peran dan rasa kepemilikan tersebut dapat ditingkatkan dengan cara pemerintah pusat memberikan target pencapaian SDGs yang lebih jelas untuk setiap daerah intensifnya. Target dan insentif akan mendorong pemda meningkatkan kinerjanya, dan pada akhirnya mencapai tujuan pembangunan dalam SDGs (Puspitasari, 2019).

Salah satu target dari pencapaian SDGs di bidang ekonomi adalah mengentaskan kemiskinan global dengan segala bentuknya, yang merupakan hal yang mendasar dan utama dalam melaksanakan pembangunan. Kemiskinan adalah halangan luar biasa bagi masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yang akan berakhir dari segala bentuknya di mana-mana pada tahun 2030 dan pengentasannya telah ditempatkan di puncak prioritas SDGs PBB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2015). Publikasi bank dunia, *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty* mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dengan standar kehidupan yang layak tidak tercapai. Di Indonesia perkembangan tingkat kemiskinan pada periode 1999-2017 cenderung mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun persentasenya. Adapun penurunan kemiskinan yang terjadi terlihat dari sisi absolut maupun relatif. Meskipun kemiskinan secara umum mengalami penurunan, presentase kemiskinan masih berada pada dua digit (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017). Samputra dan Munanda (2019) menambahkan, kondisi kemiskinan yang tinggi terjadi hampir disebagian besar provinsi di luar pulau Jawa. Fakta tersebut menggambarkan bahwa masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mencapai standar hidup yang layak sehingga berpotensi menyebabkan kemunduran ekonomi. Pada dasarnya keberhasilan tersebut dapat diukur melalui pencapaian pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting guna mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat. IPM juga merupakan data strategis guna mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Terdapat tiga dimensi dasar dalam IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi standar hidup layak diukur melalui satu indikator, pengeluaran per kapita. Indikator inilah yang akan digunakan sebagai ukuran pencapaian SDGs di bidang ekonomi. Nilai IPM yang tinggi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Keberhasilan program SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah memiliki wewenang dan dana dapat melakukan berbagai inovasi, menyediakan layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah, dan yang lebih penting adalah dekat kepada warganya. Hal ini berarti bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah (Puspitasari, 2019). Pada dasarnya keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan diwilayahnya dapat diukur melalui pemenuhan standar hidup yang layak bagi masyarakat dengan output peningkatan pengeluaran per kapita.

Agar menyukseskan tujuan tersebut tentunya dibutuhkan pula anggaran yang memadai, seperti anggaran dari pemerintah pusat dan juga anggaran dari daerah masing-masing. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan bantuan sosial sebagai

strategi dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Terbukti sejak tahun 2010, pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan target pengentasan kemiskinan dan memprioritaskan pentingnya anggaran bantuan sosial yang berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengentasan kemiskinan yang terus berlanjut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan pengentasan kemiskinan, klasterisasi program pengentasan kemiskinan didasarkan pada basis sasaran dari setiap program.

Selain anggaran bantuan sosial, pemerintah juga mengalokasikan belanja modal untuk mendukung pembangunan seperti aset daerah, infrastruktur, sarana dan prasarana dasar di berbagai wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Saragih (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk melakukan aktivitas pembangunan, sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak digunakan dalam program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Menurut penelitian yang dilakukan Isomia Uregu Ile dan Ewald Quaye Garr (2020), meskipun pembangunan infrastruktur berpotensi untuk mengurangi kemiskinan pedesaan, pengentasan kemiskinan seharusnya tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur tetapi juga kerangka kebijakan dan tata kelola yang memandu penyediaannya. Hal tersebut menandakan pemerintah seharusnya menerapkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang membantu penyediaannya. Dengan demikian kebijakan pengalokasian dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan di Indonesia selaras dengan tujuan SDGs di bidang ekonomi.

Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32/2004). Tujuan dari transfer ini yaitu agar mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Pratomo, 2015). Menurut penelitian yang dilakukan GA Upali Wickramasinghe (2017), mengurangi kemiskinan pedesaan dan mendorong pertumbuhan inklusif tidak dapat diwujudkan dengan hanya terbatas pada pertanian, melainkan dapat dicapai dengan mencari kerangka arah kebijakan yang lebih luas yang memfasilitasi peningkatan hubungan antarsektoral. Hal tersebut menandakan bahwa peran kebijakan pemerintah sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang membuat pemerintah daerah dapat lebih dekat dengan warganya. Kebijakan desentralisasi dibuat untuk mengedepankan demokrasi dan memberi kesempatan pada setiap daerah agar mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Pencapaian SDGs bidang ekonomi merupakan salah satu prioritas nasional pemerintah Indonesia yang harus segera diatasi. Penelitian yang dilakukan Roomi Saeed Hayat dan Anwaar Mohyuddin (2019) menyatakan bahwa dalam konteks sosial, studi dapat diterapkan di seluruh dunia dengan memodifikasi budaya tertentu, sehingga studi dan evaluasi program harus

dilakukan yang menghasilkan pencapaian berbagai faktor melalui pengentasan kemiskinan, adalah kunci dari semua SDGs jika itu ditangani berarti bahwa semua SDGs sedang ditangani. Dengan demikian, SDGs poin pertama merupakan kunci keberhasilan dari semua SDGs.

Berbagai penelitian mengenai SDGs telah dilakukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun penelitian dari luar negeri yang meneliti tentang SDGs khususnya bidang ekonomi diantaranya Isomia dan Ewald (2020), Andreas et al (2019), Tatsufumi Yamagata (2016) dan Palash Kamruzzaman (2016) pada SDGs poin 1, S.Lee (2019) dan Ga Upali Wickramasinghe (2017) pada sektor pertanian atau bidang ekonomi poin 2, serta Arno J.Van Niekerk (2020) tentang SDGs bidang ekonomi poin 8. Adapun penelitian dalam negeri yang mengkaji SDGs bidang ekonomi diantaranya Eko dan Hendry (2020), Hary Sastryawanto (2017), dan Ishartono dan Raharjo (2016). Dari berbagai penelitian tersebut, belum ada yang meneliti terkait pencapaian SDGs di bidang ekonomi terkait poin pertama yaitu mengentaskan kemiskinan global dengan segala bentuknya dimana variabel Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, DAU, dan DAK serta studi empiris kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2018-2019 menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan Puspitasari dan Arifin (2019) yang meneliti pengaruh belanja fungsi kesehatan, belanja kesejahteraan sosial, belanja modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pencapaian SDGs di bidang kesehatan. Hal ini memberikan acuan pada penelitian ini guna meneliti pengaruh belanja pemerintah terhadap SDGs yang terfokus pada bidang ekonomi.

## 2. METODE

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan kuantitatif dimana data diperoleh dari angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Bidang Ekonomi.

### Populasi, Sampel, Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sumber data yang ada pada data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data statistik berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diproses atau diukur dengan Pengeluaran per Kapita. Populasi yang digunakan adalah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia yang berjumlah 514 daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti dengan kriteria yaitu kelengkapan pada data yang dipublikasikan.

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
2. Kabupaten/kota yang mempublikasikan informasi keuangan pada Laporan Realisasi APBD tahun 2018-2019 secara lengkap.

3. Kabupaten/kota yang memiliki data pengeluaran per kapita 2018-2019. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, kabupaten/kota yang dapat dijadikan sampel penelitian berjumlah 507 daerah yang menghasilkan 1011 observasi.

### Teknik Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Menurut Sriyana (2014), regresi data panel adalah regresi dengan menggabungkan sekaligus data cross-section dan time-series dalam sebuah persamaan.

Dalam pengujian data panel, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu, pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary/pooled least square/common effect*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pertama, dalam menentukan pemilihan model yang akan digunakan antara *common effect* atau *fixed effect* dilakukan uji chow. Apabila diketahui nilai F statistik pada uji chow signifikan maka dilanjutkan uji hausman untuk menentukan antara model *fixed effect* atau *random effect*. Apabila nilai probabilitas pada uji hausman kurang dari  $\alpha$ , maka hasilnya signifikan, sehingga model *fixed effect* terpilih. Sebaliknya nilai probabilitas pada uji hausman lebih dari  $\alpha$ , maka model yang digunakan adalah *random effect*.

Peneliti menggunakan software Eviews 9.0 dan Microsoft Excel 2010 sebagai bantuan dalam melakukan analisis data. Persamaan regresi data panel dalam penelitian ini diproyeksikan sebagai berikut:

$$SDGs = \alpha + \beta_1 BS_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

SDGs = *Sustainable Development Goals*

$\alpha$  = Konstanta

BS = Belanja Bantuan Sosial

BM = Belanja Modal

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

$\varepsilon_{it}$  = Kesalahan residual (error)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Ringkasan Pengujian Chow – Pengujian Hausman**

	<i>Prob. Chi-Square</i>	Hasil
<i>Chow Test</i>	0.0000	<i>Fixed Effect Model</i>
<i>Hausman Test</i>	0.0000	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: data sekunder diolah Eviews 9.0

Dalam menguji data dengan analisis regresi data panel, sebelumnya data harus dipastikan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Berikut adalah gambaran singkat hasil uji asumsi klasik :

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan model Central Limit Theorem (CLT) yang menyatakan bahwa apabila sampel yang diuji lebih dari 30 ( $n \geq 30$ ), maka dikatakan normal. Sampel pada penelitian ini berjumlah 1011 observasi yang artinya terdistribusi normal karena lebih dari 30.

**Tabel 2. Hasil Pengumpulan Data**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Populasi	514
2.	Sampel diperoleh	514
3.	Data Realisasi APBD yang tidak lengkap	7
<b>Total Sampel yang digunakan dan diolah</b>		<b>507</b>
<b>Total Observasi</b>		<b>1011</b>

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

	BS	BM	DAU	DAK
BS	1.000000	0.148127	0.092024	0.065523
BM	0.148127	1.000000	0.530431	0.511257
DAU	0.092024	0.530431	1.000000	0.833230
DAK	0.065523	0.511257	0.833230	1.000000

*Sumber: data sekunder diolah Eviews 9.0*

Berdasarkan pengujian metode korelasi parsial antar variabel bebas di atas, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dengan nilai matriks covarians kurang dari 0,9.

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55.11117	1.18E-10	4.67E+11	0.0000
BS	-5.88E-23	5.92E-23	-0.994520	0.3205
BM	-3.81E-23	3.84E-23	-0.991299	0.3220
DAU	1.57E-22	1.58E-22	0.994065	0.3207
DAK	9.37E-23	9.43E-23	0.993618	0.3209

*Sumber: data sekunder diolah Eviews 9.0*

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas signifikan semua variabel penelitian ini lebih besar dari 5% ( $>0,05$ ), dengan demikian data regresi penelitian ini tidak terjerang masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Autokorelasi**

Durbin-Watson stat	0.564809
--------------------	----------

*Sumber: data sekunder diolah Eviews 9.0*

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai D-W sebesar 0.564809 yang terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi (Santoso, 2012: 242).

**Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	t-hitung	t-tabel	Signifikansi	Keterangan
Belanja Bantuan Sosial	0.816262	$\pm 1.9623$	0.4147	H1 Ditolak
Belanja Modal	5.214958	$\pm 1.9623$	0.0000	H2 Diterima
Dana Alokasi Umum	9.487673	$\pm 1.9623$	0.0000	H3 Diterima
Dana Alokasi Khusus	3.933358	$\pm 1.9623$	0.0001	H4 Diterima

*Sumber: data sekunder diolah Eviews 9.0*

- 1) Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan variabel Belanja Bantuan Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDGs) di bidang ekonomi. Hipotesis ini ditolak karena diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,4147 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 dan nilai t sebesar 0.816262 kurang dari t tabel  $\pm 1.9623$ . Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Celeste.Ch.E.Rarun, Dkk. (2018), yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial pemerintah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustien Sendouw, Vekie Adolf Rumate, Debby Ch. Rotinsulu (2017), menyatakan bahwa Belanja Modal, Belanja Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Dharmakarja (2017), secara umum, penyaluran bantuan dari negara kepada penerima bantuan juga menyisakan beberapa masalah. Misalnya dalam hal penetapan penerima bantuan, kesulitan mengidentifikasi penerima bantuan yaitu warga negara miskin dan tidak mampu dalam kondisi penerima bantuan yang tidak menetap dan tidak dilengkapi kartu identitas adalah tantangan tersendiri. Terkadang, adanya perbedaan data dan perbedaan dalam menentukan jumlah dan sasaran penerima bantuan inilah yang kemudian menjadi celah dan kerap kali dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Apabila pemerintah ingin meningkatkan SDGs di bidang ekonomi pemerintah harus dapat meningkatkan efektivitas pengalokasian Belanja Bantuan Sosial.
- 2) Hipotesis Kedua ( $H_2$ ) menyatakan variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDGs) di bidang ekonomi. Hipotesis ini diterima karena diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,0000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 dan nilai t sebesar 5.214958 lebih besar dari t tabel  $\pm 1.9623$ . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Isomia Uregu Ile dan Ewald Quaye Garr (2020) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berpotensi untuk mengurangi kemiskinan pedesaan. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ezra Kaligis, Dkk serta Khodijah Mustaqimah, Dkk. (2017), dapat diketahui bahwa belanja modal memberi dampak positif terhadap kemiskinan. Adanya penyediaan infrastruktur yang memadai tentu akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.
- 3) Hipotesis Ketiga ( $H_3$ ) menyatakan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Sustainable Development Goal* (SDGs) di bidang ekonomi. Hipotesis ini diterima karena diperoleh nilai signifikansi (*P-value*) sebesar 0.0000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 dan nilai t sebesar 9.487673 lebih besar dari t tabel  $\pm 1.9623$ . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyowati dan Suparwati (2012), Adel Rivianto, dkk (2019), dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana salah satu komponennya adalah standar hidup yang layak. Dana Alokasi Umum bersumber dari APBN yang oleh dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU digunakan untuk menyamakan kemampuan

keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diatur pemerintah pusat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan daerah kepada masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya DAU tersebut kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Dengan demikian, DAU berpotensi membantu pemerintah dalam mencapai SDGs di bidang ekonomi terutama poin pertama yaitu mengentaskan kemiskinan dengan segala bentuknya.

- 4) Hipotesis keempat ( $H_4$ ) menyatakan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di bidang ekonomi. Hipotesis ini diterima karena diperoleh nilai signifikansi (*P-Value*) sebesar 0,0001 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 dan nilai t sebesar 3.933358 lebih besar dari t tabel  $\pm 1.9623$ . Pengalokasian Dana Alokasi Khusus sudah tepat dalam peningkatan SDGs di bidang ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lugastoro (2013), Irwanti (2014), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014), Adel Riviando, dkk (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap IPM yang mana salah satu komponennya adalah standar hidup yang layak. Ditama Binbangkum menjelaskan bahwa pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, dan/atau peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal (DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, pelatihan, dan perjalanan dinas). Berkaitan dengan tujuan SDGs dalam bidang ekonomi yaitu poin pertama, pengentasan kemiskinan global dengan segala bentuknya, menjadi salah satu prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, DAK berpotensi membantu pemerintah dalam mencapai SDGs di bidang ekonomi.

**Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)**

F-statistic	319.5790
Prob(F-statistic)	0.000000

*Sumber: data sekunder diolah Eviews 9.0*

Berdasarkan tabel uji F (simultan) di atas dapat diketahui bahwa variabel Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan nilai prob(F-statistic) lebih kecil dari 0,05 dan F.statistic 319.5790 lebih besar dari F tabel  $\pm 2.6137$ .

**Tabel 8. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Adjusted R-squared	0.993822
--------------------	----------

*Sumber: data sekunder diolah Eviews 9.0*

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.993822 ini memperlihatkan bahwa dalam variasi variabel independen sebesar

99.3822% dapat menjelaskan variabel dependen. sedangkan selisihnya 0,6178% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Pada penelitian ini koefisien determinasi  $R^2$  yang digunakan yaitu nilai *adjusted R-squared* pada saat menilai model regresi yang terbaik. Disebabkan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial, belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencapaian SDGs di bidang ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar 0.4147. Belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian SDGs di bidang ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian SDGs di bidang ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian SDGs di bidang ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar 0.0001. Secara simultan, belanja bantuan sosial, belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs di bidang ekonomi dengan nilai probabilitas 0.0000.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sehingga perlu adanya hal yang diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan yang ada di dalam penelitian sebagai berikut :

1. Dalam Penelitian ini hanya menggunakan empat variable independen, yaitu Bantuan Sosial, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di bidang Ekonomi.
2. Sampel pada penelitian hanya menggunakan rentang waktu dua tahun yaitu tahun 2018-2019 yang cenderung singkat.
3. Pada penelitian ini hanya berfokus pada salah satu bidang *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu bidang ekonomi poin pertama.

##### b. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya agar memperpanjang periode penelitian dan melakukan penelitian pada bidang ekonomi dengan sub yang berbeda atau bidang lain SDGs misalnya sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, yang terdampak pandemi covid-19.
2. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkombinasikan bidang SDGs agar lebih efektif dan efisien, misalnya bidang ekonomi dengan bidang sosial, bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
3. Diharapkan juga agar menambahkan variabel independen yang lain agar dapat dijelaskan lebih rinci

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Lombok: SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.  
www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
- Anwar, Meilita Lukitasari, Sutomo Wim Palar, dan Jacline I. Sumual. 2016. Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 02
- Artana Yasa, I Komang Oka dan Sudarsana Arka. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *JEKT*, No. 8(1) : 63-71
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Kajian Indikator Susrainable Development Goals (SDGs)*.  
<https://bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. <https://bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. 2016. Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  
<https://bps.go.id>
- Celeste.Ch.E.Rarun, George M.V.Kawung, dan Audie O. Niode (2018). “Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.18, No.1*
- Dharmakarja, I Gede Made Arttha. 2017. Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. *Substansi*, Volume 1 Nomor 2
- Edward B. Barbier dan Joanne C. Burgess. 2017. *The Sustainable Development Goals and the systems approach to sustainability. Discussion Paper No. 2017-28*  
<http://www.economics/discussionpapers/2017-28>
- Ezra Kaligis, Daisy S.M Engka, dan Krest D Tolosang. 2017. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Minahasa Utara Melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Intervening Variabel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 17 No. 02, 94-105
- Ishartono, Santoso Tri Raharjo. 2016. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. Social Work Jurnal* volume: 6 No: 2 Halaman: 154-272
- Isomia Uregu Ile, Ewald Quaye Garr. 2020. Infrastructure Policy Reforms and Rural Poverty Reduction in Ghana: Perspective from the Keta Sea Defence Project.  
<http://www.researchgate.net/publication/345671790>
- Justice Mensah. 2019. *Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action: Literature Review. Cogent Social Sciences*, 5:165531
- Khodijah Mustaqimah, Sri Hartoyo dan Idqan Fahmi. 2017. Peran Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Pembangunan Manusia dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2):1-15

- Komariah, Diah, Mukhammad Yogiandoro dan Alexandra Hukom. 2019. Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*.
- LIU Qian-Qian, Yu Man, dan WANG Xiao-Lin. 2015. *Poverty reduction within framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda. Climate research 6 (2015) 67-73*. Tersedia pada [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)
- Lugastoro, D.P. & Ananda, C.F. (2013). Analisis Pengaruh PAD dan Dana perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*
- Maziyya, Putu Ayu, I Komang Gede Sukarsa, dan Ni Made Asih 2015. Mengatasi Heteroskedastisitas pada Regresi dengan Menggunakan Weighted Least Square. *E-Jurnal Matematika*, Vol.4 (1), pp. 20-25
- Riviando Adel, Henri Agustin, Halmawati. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntans*, Vol.1, No.1.Seri A, Hal: 1-17
- Robert Costanza, Lew Daly, Lorenzo Fioramonti, Enrico Giovannini, Ida Kubiszewski, Lars Fogh Mortensen, Kate E Pickett, Kristin Vala Ragnarsdottir, Roberto De Vogli, dan Richard Wilkinson., 2016. *Modelling and measuring sustainable wellbeing in connection with the UN Sustainable Development Goals. Ecological Economics* 130 (2016) 350-355. Tersedia pada [www.elsevier.com/locate/ecoleon](http://www.elsevier.com/locate/ecoleon).
- Roomi Saeed Hayat, Anwaar Mohyuddin (2019). “*Combating Poverty: Achieving SDGs in Tharparkar*”. *Global Regional Review*. Vol.IV, No. IV
- Sari, Dian Puspita dan Atwal Arifin. 2019. Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Kesejahteraan Sosial, Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs) Dibidang Kesehatan*”. *Seminar Nasional dan Call For Paper 2020 : “Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0”*. STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, pp. 261-270. ISBN 978-602-51174-9-7
- Sendouw, Agustien, Vekie Adolf Rumat, dan Debby Ch. Rotinsulu. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 18, No.5
- Sriyana, Jaka (2014). “Metode Regresi Data Panel”. *Penerbit EKONISIA*
- Suartha. 2012. Efisiensi Bantuan Pemerintah Kabupaten Badung Terhadap Keberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol.VIII, No.2, ISSN:1907-3275
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 *tentang Kesejahteraan Masyarakat*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 *tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

*Peraturan Pemerintah No. 58/2005*

Tatsufumi Yamagata. 2016. *Sustainable development goals and Japan: Sustainability overshadows poverty reduction. Asia-Pasific Development Journal vol.23, No. 2.*

*World Development Report 2000/2001 : Attacking Poverty*

Zakiah Nurlalila, Made Susilawati, Desak Putu Eka Nilakusmawati. 2017. Penerapan Metode Newey West dalam Mengoreksi Standard Error ketika terjadi Heteroskedastisitas dan Autokorelasi pada Analisis Regresi. *E-Jurnal Matematika Vol.6 (1), pp. 7-14*